BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Daerah perbatasan adalah bagian wilayah negara yang terletak disepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, pada batas wilayah darat (UU RI No. 43 Tahun 2008). Kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis, yang penting bagi kehidupan orang banyak di seluruh tanah air dalam artian banyak manfaat (politik, ekonomi, sosial budaya), masyarakat, lingkungan, bangsa, pertahanan dan keamanan.

Pengelolaan perbatasan tidak lagi dipandang hanya sebagai bagian terbelakang dari suatu wilayah negara, tetapi juga dijadikan sebagai "beranda terdepan" (Noor, 2018). Kawasan Natuna termasuk kawasan perbatasan dimana kawasan tersebut berbatasan langsung dengan negara tetangga dan berada pada kawasan yang strategis. Kawasan perbatasan juga merupakan kawasan strategis bagi sebuah negara sebab secara geografis umumnya memiliki potensi sumber daya alam dan peluang pasar karena kedekatan jaraknya dengan negara tentangga (Priangani, 2018).

Dalam rangka mendorong pembangunan di suatau daerah, pemerintah juga mengeluarkan peraturan mengenai penetapan kawasan perbatasan strategis untuk dikembangkan. Dalam (perubahan) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dijelaskan bahwa kawasan perbatasan merupakan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang penataan ruangnya diperioritaskan, karena memiliki pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, social, budaya, dan atau lingkungan (BPP, 2021). Dengan adanya penetapan kawasan strategis menjadikan Natuna sebagai wilayah yang diprioritaskan dan juga menjadikan lokasi wilayah Natuna menjadi sebuah prioritas. Lokasi prioritas di Kabupaten Natuna tertera pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1 lokasi Perioritas di Kepulauan Riau

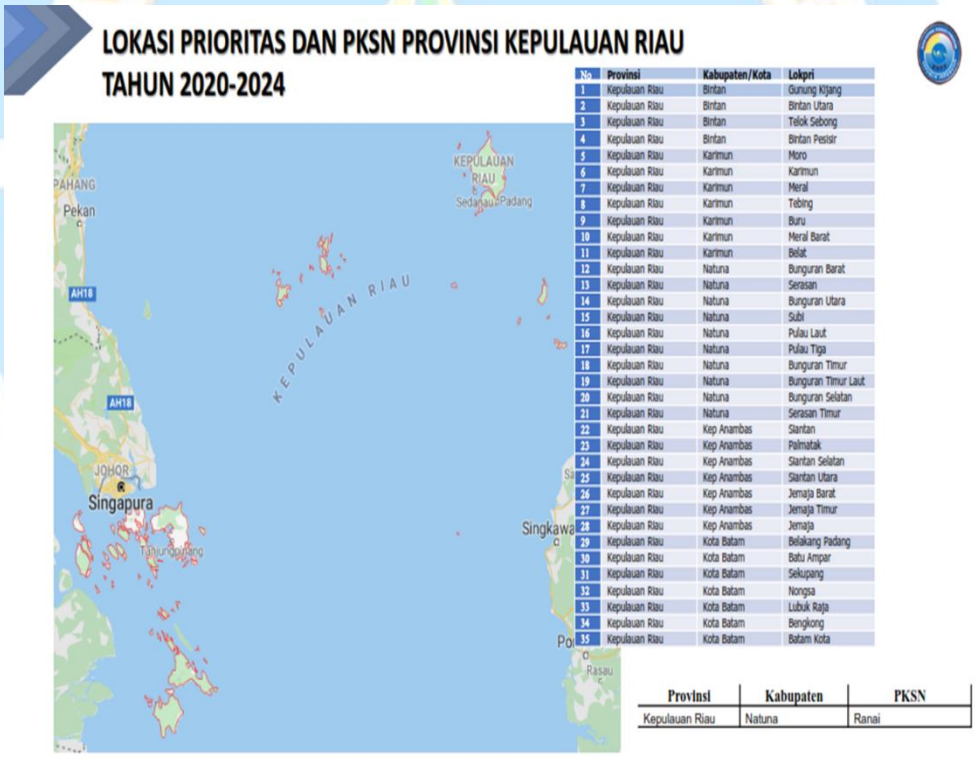

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Lokpri
1	Kepulauan Riau	Bintan	Gunung Kijang
2	Kepulauan Riau	Bintan	Bintan Utara
3	Kepulauan Riau	Bintan	Telok Sebong
4	Kepulauan Riau	Bintan	Bintan Pesisir
5	Kepulauan Riau	Karimun	Moro
6	Kepulauan Riau	Karimun	Karimun
7	Kepulauan Riau	Karimun	Meral
8	Kepulauan Riau	Karimun	Tebing
9	Kepulauan Riau	Karimun	Buru
10	Kepulauan Riau	Karimun	Meral Barat
11	Kepulauan Riau	Karimun	Belat
12	Kepulauan Riau	Natuna	Bunguran Barat
13	Kepulauan Riau	Natuna	Serasan
14	Kepulauan Riau	Natuna	Bunguran Utara
15	Kepulauan Riau	Natuna	Subi
16	Kepulauan Riau	Natuna	Pulau Laut
17	Kepulauan Riau	Natuna	Pulau Tiga
18	Kepulauan Riau	Natuna	Bunguran Timur
19	Kepulauan Riau	Natuna	Bunguran Timur Laut
20	Kepulauan Riau	Natuna	Bunguran Selatan
21	Kepulauan Riau	Natuna	Serasan Timur
22	Kepulauan Riau	Kep Anambas	Siantan
23	Kepulauan Riau	Kep Anambas	Palmatak
24	Kepulauan Riau	Kep Anambas	Siantan Selatan
25	Kepulauan Riau	Kep Anambas	Siantan Utara
26	Kepulauan Riau	Kep Anambas	Jemaja Barat
27	Kepulauan Riau	Kep Anambas	Jemaja Timur
28	Kepulauan Riau	Kep Anambas	Jemaja
29	Kepulauan Riau	Kota Batam	Belakang Padang
30	Kepulauan Riau	Kota Batam	Batu Ampar
31	Kepulauan Riau	Kota Batam	Sekupang
32	Kepulauan Riau	Kota Batam	Nongsa
33	Kepulauan Riau	Kota Batam	Lubuk Raja
34	Kepulauan Riau	Kota Batam	Bengkong
35	Kepulauan Riau	Kota Batam	Batam Kota

Sumber: BPP Kabupaten Natuna 2021

Menjadikan Natuna sebuah prioritas di perbatasan merupakan kebijakan yang bagus dalam pengembangan potensi Natuna kedepannya. Sejak ditetapkannya Natuna sebagai kawasan strategis pada tahun 2008 seharunsya banyak pengaruh positif untuk pembangunan di Natuna hanya saja sejauh ini banyak permasalahan dan isu strategis yang berakibatkan pembangunan di daerah tersebut belum dilkukan secara optimal menurut rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) ada beberapa perumusan permasalahan yang menjadi dasar pemikiran untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam upaya pelaksanaan pembangunan lima tahun mendatang. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Natuna selama periode pembangunan berjalan, permasalahan utama pembangunan Kabupaten Natuna yakni, “Belum optimalnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Natuna”. Permasalahan utama pembangunan Kabupaten Natuna tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 5 (lima) pokok permasalahan sebagai berikut.

1. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia
2. Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat
3. Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
4. Belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah yang berkelanjutan
5. Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah.

Sejauh yang telah dilihat dari berbagai permasalah dihadapi Natuna sebagai wilayah perbatasan dimana hambatan yang menghabat perkembangan

potensi/pembangunan di Natuna masih menjadi problem dari perkembangan di Natuna. Pembangunan-pembangunan yang telah di bangun untuk menunjang perekonomian di Natuna memang dibangunan sesuai dengan apa yang diperlukan namun secara pengelolaannya belum dikelola secara optimal hal tersebut bisa dilihat dari vidato yang disampaikan bupati terkait pengembangan kelautan Natuna di atas yang menandakan pembangunan tersebut tidak berjalan dengan baik.

Natuna memiliki 15 (lima belas) kecamatan, diantaranya 13 (tiga belas) kecamatan lokasi prioritas yaitu Kecamatan Serasan, Kecamatan Bunguran Barat (dimekarkan Kecamatan Bunguran Batubi), Midai (dimekarkan Kecamatan Suak Midai), Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Serasan Timur, Kecamatan Subi, Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Pulau Tiga (dimekarkan Kecamatan Pulau Tiga Barat), Kecamatan Bunguran Timur Laut dan Kecamatan Bunguran Selatan, serta 1(satu) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yaitu Kota Ranai Kecamatan Bunguran Timur (BPP, 2021).

Natuna yang berada didaerah perbatasan memiliki kekayaan alam yang melimpah dengan potensi ekonomi, memungkinkan sumber daya alam yang dimiliki bisa dimanfaatkan dengan maksimal agar dapat menghasilkan barang dan jasa yang bernilai saing tinggi. Potensi yang memungkinkan memiliki peluang yang tinggi untuk membangkitkan perekonomian yaitu potensi ekonomi sektor kelautan. Ekonomi kelautan atau ekonomi maritim adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan diwilayah pesisir, lautan, dan di darat (lahan atas) yang menggunakan sumber daya

alam dan jasa kelautan atau maritim untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan.

Natuna memiliki potensi pengembangan (ekonomi) kelautan yang besar dan beragam. Kawasan laut Natuna memiliki Ekonomi kelautan dengan potensi yang sangat besar untuk menjadi sektor ekonomi unggulan, terbukti dengan sumber daya laut yang kaya dan bernilai tinggi bila diolah dengan baik akan menghasilkan barang yang bernilai tinggi. Potensi ekonomi maritim membuat daerah tersebut menjadikan sebuah prioritas yang harus dikembangkan dimana sumber daya alam melimpah dimiliki oleh Kabupaten Natuna yang salah satunya potensi perikanan. Berikut data potensi perikanan di Natuna:

Tabel 1.1 Potensi Tangkap Kabupaten Natuna Tahun 2017-2021

No	Periode Tahun	Potensi perikanan (Ton)
1.	2017	86.142
2.	2018	87.248
3.	2019	104.880
4.	2020	120.583
5.	2021	398.853

Sumber: BP3D Kabupaten Natuna 2021

Memiliki luas laut mencapai 99 persen dari total luas wilayahnya, dengan peningkatan potensi perikanan setiap tahunnya terlihat pada tabel potensi di atas. Natuna memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat besar untuk dikembangkan. Potensi ikan laut Natuna sebesar 504.212,85 ton per tahun dengan total pemanfaatan oleh Kabupaten Natuna hanya 48.698,85 ton/tahun atau 9,3 persen.

Jumlah itu hampir separuh dari potensi Wilayah Perikanan dan Pengelolaan atau WPP 711 (Laut China Selatan, Laut Natuna, dan Selat Karimata) sebesar 1.143.341 ton pertahun (Thomas, 2020). Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan akan tetap menjadi industri yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kepulauan Natuna di luar migas pada tahun 2021, yakni mencapai 40,92%, naik dari 39,95% pada tahun 2020. Dalam lima tahun terakhir, kontribusi kategori ini secara rata-rata berada di sekitaran 39 persen. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Natuna penyumbang terbesar pada perekonomian di Kabupaten Natuna adalah sektor perikanan dimana itu sebesar Rp 4,64 T ini hanya untuk sektor perikanan saja (BPS, 2021).

Pada tahun 2021, kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi kategori yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Natuna Tanpa Migas yaitu mencapai 40,92 persen, lebih tinggi dibanding tahun 2020 yang memberi kontribusi 39,95 persen. Dalam lima tahun terakhir, kontribusi kategori ini secara rata-rata berada di sekitaran 39 persen. Besarnya peranan kategori ini didukung oleh peranan Subkategori Perikanan yang nilai tambahnya menyumbangkan sekitar 31,83 persen meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 30,79 persen. Khususnya di subkategori Perikanan yang memiliki andil yang cukup besar di kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu 77,78 persen. Besarnya potensi yang dihasilkan membuat sumber daya alam tersebut harus dikelola dengan baik agar pada potensi tersebut bisa bermanfaat dengan optimal (BPS,2021).

Untuk membantu dan menunjang kebijakan pemerintah membentuk Peraturan Undang-Undang Nomor 32 tentang Kelautan Tahun 2014 yang mana dimaksudkan untuk mengatur Kelautan guna menonjolkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri kepulauan dan maritim dengan memanfaatkan sumber daya kelautan dan kegiatan di laut sesuai dengan ketentuan hukum dan kelautan internasional. Perundang-undangan ini bertujuan untuk mencapai kemakmuran bangsa dan negara guna mewujudkan laut yang lestari dan aman sebagai ruang hidup, serta ruang perjuangan bangsa Indonesia untuk memanfaatkan kekayaan laut secara bijaksana. Keberlanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang dalam memajukan kebudayaan dan ilmu pengetahuan (UU RI No. 43 Tahun 2008).

Agar masyarakat berkembang secara profesional, beretika, berdedikasi, dan mampu mengutamakan kepentingan nasional dalam mendukung pembangunan kelautan yang optimal dan terpadu dan mengembangkan peran Republik Indonesia Serikat dalam ranah maritim global sesuai dengan hukum maritim internasional untuk kepentingan bangsa dan negara, Presiden menetapkan beberapa kebijakan dan arahan agar memberikan kemudah bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, berikut merupakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia dimana kebijakan tersebut meliputi (perpres no.16 tahun, 2017):

a. Terkelolanya sumber daya kelautan secara optimal dan berkelanjutan
b. Terbangunnya kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan yang handal
c. Terbangunnya pertahanan dan keamanan kelautan yang tangguh
d. Terlaksananya penegakan kedaulatan, hukum, dan keselamatan di laut
e. Terlaksananya tata kelola yang baik
f. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang merata
g. Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan industri kelautan yang berdaya saing
h. Terbangunnya infrastruktur kelautan yang andal
i. Terselesaikan aturan tentang tata ruang laut
j. Terlaksananya perlingungan lingkungan laut
k. Terlaksananya diplomasi maritim dan
l. Terbentuknya wawasan identitas, budaya dan budaya bahari

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut perlu adanya strategi dari banyak aktor seperti, kementerian/sektor, serta pemerintah daerah dan masyarakat, untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pengembangan di bidang kelautan. Pada program yang dijalanka pemerintah pusat perlu adanya singkronisasi yang dijalankan oleh pemerintah daerah agar kebijakan yang dijalankan bisa dapat dilakukan secara optimal.

Berikut merupakan Kebijakan ekonomi yang ada di natuna berdasarkan RPJMD 2017-2021 dimana misi tersebut yang berkaitan dengan ekonomi kelautan yaitu :

a. Mewujudkan Perekonomian Berbasis Sumberdaya Alam Potensial Daerah
b. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Khususnya Masyarakat Pesisir, Nelayan dan Petani
c. Membuka Keterisoliran Daerah/desa melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut dan Pembukaan Jalan

Strategi/prioritas pembangunan pada perencanaan pembangunan Kabupaten Natuna salah satunya yaitu Pengembangan dan Penguatan Potensi Ekonomi Daerah Ekspor produk unggulan dimana pengembangan penguatan ini merupakan salah satu kegiatan yang dapat menghasilkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Banyak faktor yang harus diperhitungkan saat mengekspor suatu produk, selain ketersediaan bahan baku, efisiensi produksi dan kesesuaian barang dengan kebutuhan masyarakat suatu negara menjadi alasan utama barang tersebut diminati oleh pihak luar. Suatu negara dapat menerima suatu barang berdasarkan kualitas dan kebutuhannya. Pemerintah Kabupaten Natuna kemudian harus mencari peluang ekspor guna meningkatkan perekonomian. Berikut merupakan strategi-strategi yang menjadi acuan pemerintah dalam penetapak kebijakan.

Strategi kebijakan pengembangan dan penguatan potensi ekonomi daerah di Kabupaten Natuna 2017-2021 sebagai berikut :

1. Peningkatan dan pengembangan kawasan minapolitan
2. Peningkatan daya saing produk daerah
3. Pembangunan dan pengembangan kawasan pariwisata
4. Peningkatan kualitas pelayanan investasi daerah

Strategi Kebijakan dengan Program Pembangunan Daerah di Kabupaten Natuna 2017-2021:

1. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
3. Program Penataan, Penguasaan, Penggunaan dan Penataan Tanah
4. Program Peningkatan Kerjasama Internasional
5. Program Pengembangan Teknologi Pedesaan
6. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
7. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
8. Program Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah, Penataan dan Pengembangan Wilayah
9. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
10. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investas

Untuk membantu peran pemerintah daerah dalam mencapai program kerjanya maka dibentuklah Badan Perbatasan Daerah (BPP) Kabupaten Natuna. BPP dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2011. Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Natuna bertujuan untuk menjawab tantangan pembangunan dan pengembangan diperbatasan. Badan

Perbatasan Daerah Kabupaten Natuna, sebagai badan yang baru dibentuk di tengah berbagai dinamika yang terjadi, memerlukan percepatan dalam penyelenggaraan pembangunan baik secara internal maupun merespon perkembangan secara eksternal.

Bentuk tugas yang dijalankan oleh BPP Natuna adalah menurut Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan (RENSTRA) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 memiliki program kerja yang bersinergi dalam hal tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Kabupaten Natuna (BPP, 2021) seperti :

1. Meningkatkan keterpaduan pengelolaan batas wilayah dan lintas batas negara serta meningkatnya kerjasama Sosial-Ekonomi Malaysia-Indonesia, dengan sasaran:
   a. Meningkatnya pengelolaan batas wilayah dan lintas batas Negara; dan
   b. Meningkatnya tindak lanjut kerjasama Sosek Malindo
2. Meningkatkan penggalian potensi dan pengembangan ekonomi wilayah di Kawasan perbatasan, dengan sasaran: Meningkatnya ketersediaan data dan hasil kajian potensi dan peluang pengembangan ekonomi di kawasan perbatasan
3. Meningkatkan sinergitas dalam pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan, dengan sasaran: Meningkatnya pembangunan di kawasan perbatasan sesuai dengan *Masterplan* pengembangan perbatasan. Dengan adanya keterpaduan rencana strategi di masa mendatang diharapkan dapat

tercipta koordinasi dan sinkronisasi yang baik dalam memajukan wilayah perbatasan Kabupaten Natuna

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang sudah dijelaskan maka fokus dari penelitian ini yang akan diteliti yaitu pada pengembangan potensi wilayah perbatasan khusus ekonomi kelautan dalam konteks kajian tata kelola perbatasan yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Natuna pada periode 2017-2021.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana kebijakan pengembangan potensi wilayah perbatasan dibidang ekonomi kelautan oleh pemerintah Kabupaten Natuna selama periode tahun 2017-2021?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait pengembangan potensi wilayah perbatasan dibidang ekonomi kelautan oleh pemerintah Kabupaten Natuna selama periopde tahun 2017-2021

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi berbagai pihak mengenai kebijakan pengembangan potensi wilayah perbatasan dibidang ekonomi kelautan oleh pemerintah Kabupten Natuna.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai bagaimana arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Natuna selama menjalankan jabatan pada periode 2017-2021 dan sebagai bahan untuk menambah wawasan bagi penulis dalam mempersipkan diri untuk memasuki dunia kerja.

BAB 2
KAJIAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Studi Literatur

Penelitian ini akan menggunakan penelitian terdahulu yang berhubungan atau sama dengan topik dan judul peneliti. Penulis akan mengulas kembali kajian terdahulu sebagai referensi dan pendukung untuk mencari kesamaan dan perbedaan dari penelitian ini. Adapun beberapa kajian terdahulu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Studi Literatur

No	Nama, Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil penelitian
1	Eka Purna Yudha dan Resa Ana Dina (2020)	Pengembangan Potensi Wilayah Kawasan Perbatasan Negara Indonesia (Studi kasus: Ranai-Natuna)	Pengembangan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan di Natuna perlu pertimbangkan karakteristik wilayah, potensi lokal, dan peluang pasar negara tetangga. Infrastruktur transportasi, energi, air, telekomunikasi, dan sumber daya manusia yang kuat diperlukan untuk mendukung pembangunan yang cepat. Kerja sama antar negara perbatasan Natuna dapat membantu meningkatkan infrastruktur dan memfasilitasi kerjasama antar aktor.

2	Marwasta Djakamar (2016)	Pendampingan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Di Indonesia : *Lesson Lesrned* dari KKN-PPM UGM di Kawasan Perbatasan	Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, Merauke memiliki banyak potensi yang di antaranya adalah potensi tanaman pangan, perkebunan kelapa sawit, peternakan, perikanan, kehutanan, wisata alam, wisata budaya, dan wisata sejarah. Akan tetapi, potensi-potensi tersebut belum terkelola dengan baik. Gangguan keamanan dan warga Kabupaten Merauke yang melintas ke PNG menjadi salah satu persoalan yang belum tuntas diselesaikan di kawasan perbatasan Merauke. Kedua, untuk mengembangkan kawasan perbatasan, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah harus diperkuat. Seperti di Merauke, kapasitas kelembagaan merupakan kendala utama dalam pengelolaan perbatasan.
3	M. Najeri Al Syahrin (2018)	Kebijakan Poros Maritim Jokowi dan Sinergitas Strategi Ekonomi dan Keamanan Laut Indonesia	Bahwa teori poros maritim merupakan upaya untuk mendorong peran ekonomi kelautan dan sinergi tujuan pembangunan maritim nasional dengan tujuan pembangunan ekonomi yang pelaksanaannya meliputi pembangunan alur laut. Jalan-jalan di pantai. Konektivitas antar pulau, serta dukungan untuk perdagangan dan industrialisasi, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian negara. Konsep laut juga digunakan untuk meningkatkan efisiensi pelayaran dengan meningkatkan jaringan pelayaran domestik dan internasional serta mengurangi lama tinggal sebagai hambatan operasional pelabuhan internasional.

			meningkatkan pentingnya pelayaran Diharapkan dengan subsidi dan pembangunan tol laut, pembangunan ekonomi, pertahanan, dan keutuhan wilayah perairan Indonesia dapat terwujud.
4	Andirini Pujayanti (2016)	Peran Daerah Dalam Diplomasi Ekonomi	Pemerintah daerah dapat berperan penting membantu suksesnya diplomasi ekonomi melalui jalur paradiplomasi bila ada koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah dan setiap pihak yang terkait. Dengan menguatnya desentralisasi kekuasaan dari pusat ke daerah dan bermunculannya para pemimpin kabupaten/kota dan provinsi yang proaktif melakukan terobosan dalam pembangunan daerahnya. Paradiplomasi dapat menjadi bagian kekuatan diplomasi ekonomi Indonesia. Dengan mengasumsikan bahwa economic foreign policy berawal dari kapasitas dan kemampuan domestik suatu negara, maka pemerintah (pusat dan daerah) patut mengupayakan berbagai formulasi kebijakan yang dapat mendorong kesiapan domestik secara menyeluruh

Sumber*:* olahan penulis 2022

Pada *literature review* yang penulis ambil dan kaji, terdapat beberapa persamaan mengenai pengembangan potensi wilayah perbatasan di Kabupaten Natuna, Yang membedakan dengan penelitian yang akan penulis kaji yaitu terdapat pada penggunaan teori, dan defenisi konsep. Informasi dan data-data yang terdapat dalam

literature review tersebut membantu penulis dalam menganalisis fenomena yang sedang diteliti.

2.2. Kerangka Teori

2.2.1. Tata Kelola Perbatasan

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Tata Kelola Perbatasan (*Governance for Cross-Border Region*) oleh Jose L. Wong Villanueva, Tetsuo Kidokoro dan Fumihiko Seta tahun 2021. (Wong Villanueva et al., 2021) Teori ini menyatakan bahwa pengelolaan wilayah perbatasan yang ideal dibangun melalui empat prinsip dan lima proses, yaitu:

1. Prinsip-prinsip pengelolaan perbatasan meliputi:
   a. Pengalaman bersama (*shared experience*), sejauh mana wilayah perbatasan didefinisikan oleh berbagai aktor sesuai kepentingan dan rasa memilikinya;
   b. Pembangunan Negara-bangsa (*Nation-state construction*), sejauh mana masing-masing otoritas/aktor mendefinisikan dan menjalankan kontrol yang dimiliki terkait wilayah perbatasan;
   c. Perbedaan skala (*scale difference*), sejauh mana wilayah perbatasan digunakan dalam skala kegunaan dan kontrol oleh masing-masing aktor; dan
   d. Ungkapan kekuasaan (*notions of power*), sejauh mana bentuk dan jumlah kekuasaan yang digunakan oleh masing-masing aktor.

2. Proses-proses pengelolaan perbatasan meliputi:
    a. Pengembangan pengetahuan (*knowledge creation*), proses konseptualisasi kekuasaan oleh aktor untuk mewujudkan tujuannya, yang dibangun melalui pemahaman terhadap kapabilitas dan tujuan aktor;
    b. Artikulasi hubungan (*articulation of relationship*), adalah proses pembangunan kapasitas bersama dan menciptakan kondisi untuk bekerja sama antar aktor;
    c. Pengambilan keputusan (*decision making*), merupakan proses mengadopsi hubungan yang dibangun sebagai sumber pengambilan keputusan aktor;
    d. Implementasi dan manajemen (*implementation and management*), proses konsolidasi kerja sama antar aktor menjadi tindakan bersama; dan
    e. Penilaian hasil (*appraisal of results*), adalah proses penilaian hasil tindakan bersama oleh aktor yang meliputi tiga subproses yaitu: perbedaan antara ekspektasi dengan hasil, pertimbangan konteks baru (risiko dan peluang), serta pengembangan umpan balik untuk meningkatkan kerja sama.

2.3. Kerangka Pemikiran

"Kebijakan pengembangan potensi wilayah perbatasan dibidang ekonomi kelautan oleh pemerintah Kabupaten Natuna selama periode tahun 2017-2021"

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

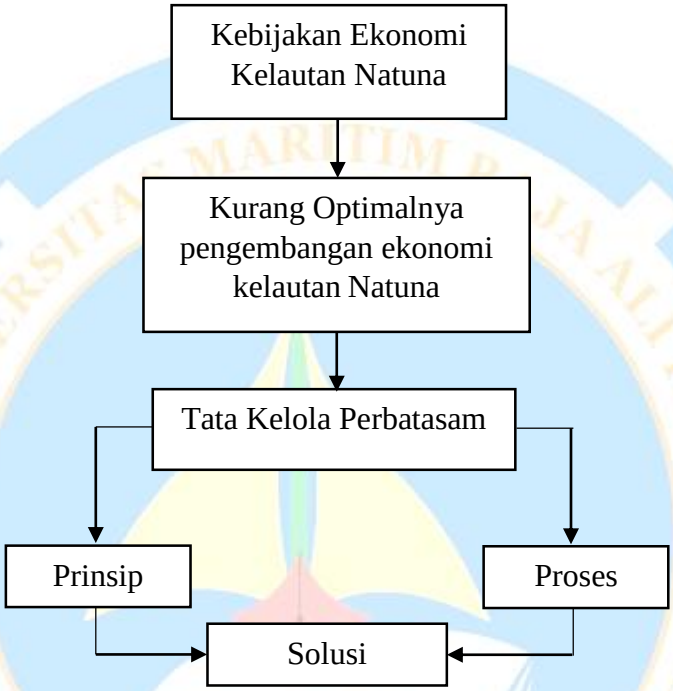

Sumber: Olahan Penulis 2022

2.4. Definisi Konsep

Defenisi konsep dalam penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana kebijakan suatu masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan diatas, Untuk memahami bagaimana kebijakan pemerintah dalam pengembangan kawasan perbatasan, maka dapat dikemukakan definisi dari masing variable-variabel, sebagai berikut:

a. Tata Kelola Perbatasan

Pengelolaan kawasan perbatasan merupakan upaya penyelenggaraan perbatasan secara terpadu yang meliputi penyelenggaraan perbatasan wilayah, pengembangan sistem informasi pengelolaan perbatasan, serta penetapan dan pemeliharaan patok-patok perbatasan. Untuk mengelola kawasan perbatasan, pemerintah membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pada 28 Januari 2010 melalui Peraturan Presiden (Perpres) no. Desember 2010, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 31 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPP. Ini merupakan tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang mengamanatkan bahwa untuk mengelola batas wilayah negara dan mengelola kawasan perbatasan pada tingkat pusat dan daerah, pemerintah nasional dan pemerintah daerah membentuk Badan Pengelola Nasional dan Badan Pengelola Daerah.

b. Implementasi

Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian dari implementasi. Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Karena implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Adapun pengertian implementasi tersebut dapat dilihat dalam beberapa pendapat di bawah ini.

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahanperubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Grindle (Mulyadi, 2015:47), "menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu".

Sedangkan Horn (Tahir, 2014:55), "mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan".

Ekawati (Taufik dan Isril, 2013:136) menyatakan, "bahwa definisi implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya"

Kemudian Gordon (Mulyadi, 2015:24) menyatakan, "implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program."

Menurut Widodo (Syahida, 2014:10), "implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu".

Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

c. Desentralisasi

Hirarki memiliki banyak arti yang berbeda sebagai sebuah konsep. Menurut *International Encyclopedia of Social Sciences* (1968:370), desentralisasi mengacu pada transfer kekuasaan dari pemerintah pusat ke badan-badan dengan fungsi hukum yang berbeda (misalnya peningkatan otonomi pemerintah daerah). atau perusahaan terbuka atau BUMN 2005 (Abdullah)

Dari sisi kepentingan pemerintah daerah, tujuan pertama desentralisasi adalah untuk mewujudkan *political equality*. Melalui pelaksanaan desentralisasi diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat unutk berpatisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal. Masyarakat didaerah, tulis Smith (1985:24), dapat dengan elegan mempraktikan bentuk-bentuk partisipasi politik, misalnya menjadi anggota partai politikdan kelompok kepentingan,mendapatkan kebebasan mengekspresikan kepentingan, dan aktif dalam proses pengambilan kebijakan.

d. Ekonomi Kelautan

Menurut Achmad Taufiqoerrochman dalam buku Kepemimpinan Maritim, Sebuah Memoar (2019), ekonomi kelautan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan di

wilayah pesisir, lautan, dan daratan. Kegiatan ekonomi tersebut menggunakan sumber daya alam serta jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang serta jasa. Beberapa kegiatan ekonomi maritim adalah mencakup tranfortasi laut, industri galagan kapal dan pesawat, pembangunanya dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait.

Ekonomi kelautan berfokus pada pengelolaan sumber daya alam yang ada di wilayah pesisir, laut, maupun daratan. Contoh kegiatan ekonomi kelautan adalah tambak garam, tambak udang, budidaya rumput laut, serta pengawetan ikan. Ekonomi kelautan bertujuan membangun wilayah pesisir atau sekitar laut.

BAB 3
METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2012:29), penelitian deskriptif adalah metode yang menggambarkan atau memberikan gambaran tentang objek penelitian dengan menggunakan data atau spesimen yang telah dikumpulkan apa adanya, tanpa analisis. menganalisis dan menarik kesimpulan yang luas.

Metode studi kasus digunakan sebagai metode deskriptif dalam penelitian ini. Menurut Nazir (2004:66), tujuan dari studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara rinci tentang latar belakang, ciri-ciri, dan ciri-ciri khas dari kasus atau keadaan individu, yang kemudian akan dijadikan hal yang generik berdasarkan hal-hal di atas. karakteristik. Tergantung pada tujuannya, ruang lingkup penelitian dapat mencakup seluruh siklus hidup individu, kelompok, atau organisasi dengan penekanan pada faktor kasus tertentu atau mencakup semua faktor kasus.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melakukan penelitian yang juga menjadi subjek penelitian. Ini tentang mendapatkan data-data penelitian yang nyata dan akurat. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian di:

a. Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Natuna yang beralamatkan Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng, Komplek Mesjid Agung Natuna Gerbang Utaraku, Gedung Diklat II Lantai Dasar.
b. Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang beralamatkan Jl. D.K.W.M. Benteng Komplek Gerbang Utaraku.
c. Kantor Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah yang beralamatkan Jalan Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng Provinsi Kepulauan Riau.
d. Kantor Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang beralamatkan Jalan Batu Sisir-Bukit Arai Gedung Baru Lantai I dan II

3.3. Fokus Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membatasi studi kualitatif dan penelitian untuk menentukan data mana yang relevan dan mana yang tidak (Moleong, 2010). Keterbatasan penelitian kualitatif ini bersumber dari signifikansi/urgensi permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan melihat bagaimana pengelolaan kawasan perbatasan di Kabupaten Natuna dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

3.4. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland (Moleong 2014), sumber data penelitian asli dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan lainya sebagai data tambahan seperti dokumen dan lainnya. Sumber berisi beragam kata serta tindakan yang merupakan bentuk dari wawancara dan tentunya melalui pengamatan. Selain dari itu sumber selanjutnya adalah sumber tertulis yang berupa arsip resmi, buku, dan jurnal ilmiah lainnya. Adapun Sumber data penelitian ini akan dibagi menjadi dua kategori yaitu data primer dan data sekunder.

3.4.1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari lokasi peneliti melalui observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data observasi untuk mengamati lingkungan yang dalam pengembangan kawasan perbatasan, dimana data tersebut diperoleh dari informan akan menjadi data penunjang dalam menjelaskan permasalahan penelitian. Menggunakan teknik pengumpulan data wawancara untuk mewawancarai informan-informan yang bersangkutan dengan penelitian.

3.4.2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah dokumen dan media antara seperti jurnal, disertasi, artikel, dan media lain yang peneliti kumpulkan secara tidak langsung dari tempat penelitian atau di luar tempat penelitian. berkaitan dengan peneliti yang akan diteliti nanti.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, digunakan teknik pengumpulan data untuk mengumpulkan data sesuai dengan prosedur penelitian. Karena tujuan utama penelitian adalah pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara.

3.5.1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan dan analisis informasi dari dokumen yang sudah ada sebelumnya dan data penelitian pendukung. Untuk mengumpulkan buku-buku arsip dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian, digunakan metode dokumenter.

3.5.2. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan langsung dengan tujuan untuk memperoleh data dan diambil melalui penglihatan langsung pada tempat yang akan diteliti. Adapun fokus yang akan diamati yaitu bagaimana prinsip dan proses tata kelola wilayah perbatasan dibidang ekonomi kelautan oleh pemerintah Kabupaten Natuna selama periopde tahun 2017-2021.

3.5.3. Wawancara

Percakapan terstruktur dengan tujuan tertentu adalah wawancara. Wawancara dilakukan oleh dua orang yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang menjawabnya (Lexy J. Meleong, 2010: 186). Kontak langsung

antara informan dan sumber informasi adalah fitur utama dari wawancara. Beberapa pertanyaan direncanakan sebelumnya untuk wawancara, tetapi yang lain muncul selama penelitian.

Peneliti mengumpulkan data, informasi, dan deskripsi tentang subjek penelitian melalui wawancara ini. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terbimbing, artinya pertanyaan yang diajukan tidak terpaku pada pedoman wawancara tetapi dapat diperdalam dan dikembangkan berdasarkan situasi dan keadaan di tempat kejadian.

3.6. Informan

Informan penelitian adalah orang yang dapat memberikan informasi. Orang, benda, atau lembaga (organisasi) yang sifatnya diteliti merupakan contoh informan penelitian (Sukandarumidi, 2002: 65). Informan penelitian ini adalah :

Tabel. 3.1 Informan Penelitian

No	Instansi	Nama	Jabatan
1.	Dinas Perikanan Kabupaten Natuna	Wan Mansur, S.PI, M.SI	Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Perikanan Budidaya
2.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna	Drs. Marhafiz Lutfhi.,Msc	Kabid Pemasaran Pariwisata
3.	Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Natuna	Hikmatul Arif, SE	Kepala Dinas
4.	Badan Perencanaan Penelitiaan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna	Irfan Riadi, SE	Kepala Jabatan Fungsional

Sumber: Olahan Penulis 2022

3.7. Teknik Analis Data

Teknik analisis data jelas digunakan dalam penelitian kualitatif untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang dibentuk dalam proposal. Sugyono (2013) Teknik deskriptif analitis digunakan dalam penelitian ini, yaitu mendeskripsikan dan menginterpretasikan temuan penelitian secara lisan atau tulisan. Analisis deskriptif menitik beratkan pada observasi dan suasana alamiah. Menurut Miles dan Huberman pertama, reduksi data (data reduction) adalah analisis yang mengklarifikasi, mengkategorikan, dan menghilangkan hal-hal yang tidak diinginkan agar dapat ditarik kesimpulan yang jelas. Data yang peneliti peroleh melalui sumber data primer dan sekunder dengan jurnal, artikel, dan media yang lainnya dari sumber yang berbeda-beda. Analisis data yang yang peneliti lakukan dengan cara mengelompokkan data yang di peroleh dalam kategori, menganalisis data yang penting, menyusun atau menyajikan data yang sesuai dengan masalah penelitian ke dalam bentuk laporan dan membuat kesimpulan agar mudah di pahami.

3.8. Jadwal Penelitian

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian

NO	Kegiatan	Bulan																			
		September 2022				Oktober 2022				Novembe r2022				Desember 2022				Januari 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	**Tahap Persiapan**																				
	- Studi literature	■																			
	- Observasi		■																		
	- Mengurus perizinan pra penelitian		■																		
	- Menulis proposal UP		■																		
	- Pengesahan judul UP			■																	
	- Bimbingan			■		■	■	■	■												
2	**Tahapan penelitian**																				
	- Observasi									■											
	- Wawancara										■										
	- Dokumentasi										■										
	- Analisis data											■	■								
	- Penyusunan laporan												■								
3	**Tahap pengujian**																				
	- Seminar UP												■								
	- Revisi UP												■								
	- Sidang skripsi																	■			
	- Revisi skripsi																		■	■	■

Sumber: Olahan penulis 2022

BAB 4
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek dan Lokasi Penelitian

4.1.1. Pemerintah Kabupaten Natuna

Kabupaten Natuna merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang dimekarkan berdasarkan UndangUndang Nomor 53 Tahun 1999, sebagai salah satu kabupaten kepulauan secara geografis terletak pada posisi utara Indonesia yang berbatasan dengan beberapa Negara di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Vietnam dan Kamboja.

Ibukota Kabupaten Natuna terletak di Ranai Kecamatan Bunguran Timur, secara astronomi Luas Wilayah Kabupaten Natuna 224.684,59 km2 dengan luas daratan sebesar 1.869,95 km2 dan luas lautan sebesar 222.815,64 km2, dengan letak titik koordinat 010 18’00”-06050’15” LU (Lintang Utara) dan 104048’30”-110020’00” BT (Bujur Timur), suhu udara rentang 27,70c sampai dengan 35,20c, dan kecepatan angin yang bergerak melewati Kabupaten Natuna bervariasi pada berkisar antara 2 sampai 26 knot, dengan rata-rata kelembapan udara sekitar 86 persen hingga 99 persen dengan rata-rata curah hujan sekitar 123,3 milimeter (BPP, 2021).

Penduduk Kabupaten Natuna mencapai 81.952 jiwa yang terdiri dari 41.910 jiwa penduduk laki-laki dan 39.942 jiwa penduduk perempuan dari 15 kecamatan, Kecamatan Bunguran Timur merupakan kecamatan yang penduduknya terbanyak

mencapai 26.910 jiwa, dengan persentase 32,84 persen, dimana Bunguran Timur merupakan pusat Pemerintahan Kabupaten Natuna. Kepadatan penduduk di Kabupaten Natuna yaitu 41,16 jiwa/km2 , kepadatan penduduk di 15 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Midai dengan kepadatan sebesar 254,49 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Bunguran Utara sebesar 9,93 jiwa/km2 (BPP 2021).

a. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi Pemerintah Kabupaten Natuna pada tahun 2017-2021.

Visinya adalah:

"Masyarakat Natunayang cerdas dan mandiri dalam kerangka keimanan dan budaya tempatan"

Penjabaran Visi Kabupaten Natuna periode 2017-2021 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat yang Cerdas yang mampu berpikir kreatif dan inovatif bagi pengembangan dirinya, maupun pengembangan daerah. Menuju masyarakat Natuna cerdas ekonomi, lingkungan dan pemerintahan dapat diwujudkan dengan kesetaraan dan pendidikan yang baik, rencana strategis yang berkesinambungan dan terintegrasi serta kemitraan.
2. Masyarakat yang Mandiri artinya mampu memberdayakan dan memenuhi kebutuhan dalam rangka melanjutkan kehidupannya yang lebih baik. Kemandirian ekonomi dan sosial merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spiritual yang memungkinkan setiap

masyarakat di Kabupaten Natuna untuk memenuhi beberapa kabutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang baik bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Peningkatan kemandirian dapat diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna dengan program-program pembangunan daerah untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran.

3. Kerangka Keimanan artinya bahwa kehidupan masyarakat Natuna senantiasa diwarnai oleh nilai-nilai keagamaan dan budi pekerti yang luhur. Pentingnya aspek agama harus diartikan secara umum bahwa nilai-nilai luhur yang dianut oleh semua agama semestinya dapat ditentukan dalam interaksi sosial sehari-hari. Salah satu fokus dari aspek ini adalah terwujudnya masyarakat yang religius dan toleran dimana semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berpikir, bersikap, dan berbuat.
4. Kebudayaan sebagai suatu keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi pedoman bagi tingkah lakunya. Masyarakat berbudaya memiliki perilaku yang dijalankan sesuai dengan moral, norma-norma yang berlaku dimasyarakat, sesuai dengan perintah disetiap agama yang diyakini, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Misi Pemerintah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Perekonomian Berbasis Sumberdaya Alam Potensial Daerah
2. Memajukan Sektor Pendidikan Melalui Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik Dan Anak Didik

3. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Khususnya Masyarakat Pesisir, Nelayan Dan Petani
4. Membuka Keterisoliran Daerah/Desa Melalui Penyediaan Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut Dan Pembukaan Jalan
5. Meningkatkan Keimanan Dan Mewujudkan Kesadaran Budaya Melayu Sebagai Payung Pembangunan Daerah
6. Mewujudkan Integritas Aparatur Pemerintah Sebagai Pelayan Masyarakat

b. Susunan Organisasi

Dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kabupaten Natuna menetapkan Perangkat Daerah Instansi Pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik, adapun Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diantaranya:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 11).
2. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 12).

3. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Natuna. Susunan organisasi yang berlaku sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut sebagai berikut:
    1. Bupati dibantu oleh seorang Wakil Bupati.
    2. Sekretariat Daerah terdiri dari :
        1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
        2. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan.
        3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
        4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari empat Bagian yaitu :
            a. Bagian Tata Pemerintahan
            b. Bagian Kesejahteraan Rakyat
            c. Bagian Hukum
            d. Bagian Kerja Sama.
        5. Asisten Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari tiga Bagian yaitu :
            a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
            b. Bagian Administrasi Pembangunan
            c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
        6. Asisten Administrasi Umum terdiri dari tiga Bagian yaitu :
            a. Bagian Organisasi

b. Bagian Umum

c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4. INSPEKTORAT
5. Dinas Daerah terdiri dari 20 Dinas sebagai berikut :
    1. Dinas Pendidikan
    2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
    3. Dinas Kesehatan
    4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
    5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
    6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
    7. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
    8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
    9. Dinas Komunikasi dan Informatika
    10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    11. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
    12. Dinas Perhubungan
    13. Dinas Pertanian
    14. Dinas Perikanan
    15. Dinas Lingkungan Hidup
    16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

17. Dinas Ketahanan Pangan
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19. Dinas Pemadam Kebakaran
20. Dinas Pemuda dan Olahraga
21. Dinas Sosial
22. Satuan Polisi Pamong Praja

6. Badan Daerah sebagai berikut :
    1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
    2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
    3. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
    4. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
    5. Badan Pengelola Perbatasan Daerah
    6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.
    7. Kecamatan-Kecamatan sebagai berikut :
        1. Kecamatan Bunguran Timur
        2. Kecamatan Bunguran Barat
        3. Kecamatan Midai
        4. Kecamatan Serasan
        5. Kecamatan Bunguran Tengah
        6. Kecamatan Pulau Laut
        7. Kecamatan Pulau Tiga
        8. Kecamatan Bunguran Utara

9. Kecamatan Subi
10. Kecamatan Bunguran Timur Laut
11. Kecamatan Bunguran Selatan
12. Kecamatan Pulau Tiga Barat
13. Kecamatan Serasan Timur
14. Kecamatan Suak Midai
15. Kecamatan Bunguran Batubi

8. Badan Usaha Milik Daerah terdiri dari 1 BUMD yaitu Perusahaan Daerah Kabupaten Natuna.

c. Pegawai Negeri Sipil Daerah Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin

Berdasarkan pendidikan dan jenis kelamin pegawai Daerah Kabupaten Natuna dapat kita lihat melalui penjelasan table dibawah ini, dimana pendidikan dan jenis kelamin juga akan memberikan penilaian berbeda terhadap kinerja seseorang. Berdasarkan pendidikan dan jenis kelamin, dari jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 4.1 Kondisi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Natuna Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin

TAMATAN PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		TOTAL
	Laki-Laki	Perempuan	
SLTP/Sederajat	31	0	31
SMA/Sederajat	446	190	636
Diploma I, II	94	82	176
Diploma III/Sarjana Muda	112	248	360
Sarjana (S1)	763	698	1.461
Tingkat Magister/Doktor/Ph.d	86	27	113
Jumlah/Total	**1.554**	**1.246**	**2.800**

Sumber: LKPJ Kabupupaten Natuna 2021

Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Natuna dalam upaya meningkatkan tatakelola pemerintahan dan memberikan pelayanan pada masyarakat, aparaturnya tersebar di 15 Kecamatan yang terdiri dari aparatur pelaksana dan fungsional medis dan fungsional pendidikan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2 Data Pegawai Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah
1	Bunguran Timur	1.676
2	Bunguran Barat	116
3	Bunguran Utara	109
4	Bunguran Selatan	82
5	Bunguran Tengah	77
6	Bunguran Timur Laut	116
7	Bunguran Batubi	58
8	Pulau Tiga	59
9	Pulau Tiga Barat	53
10	Subi	96
11	Midai	87
12	Suak Midai	10
13	Serasan	131
14	Serasan Timur	75
15	Pulau Laut	55
Total Jumlah		**2.800**

Sumber: LKPJ Kabupaten Natuna 2021

4.2 Hasil Penelitian

Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan informan yang menjadi subjek untuk memberikan informasi. Hasil penelitian ini berisikan tentang prinsip dan proses dalam tata kelola perbatasan dimana aktor yang terkait sebagai peran utama dalam menjalakan tugas pengembangan ekonomi kelautan di Kabupaten Natuna. Berikut prinsip dan proses dalam pengembangan ekonomi kelautan Kabupaten Natuna :

4.2.1 Prinsip-prinsip Pengelolaan Perbatasan

Menurut Russel Swanburg prinsip merupakan kebenaran yang mendasar dan dokrin yang mendasari gagasan. Jadi prinsip dapat diartikan sebagai gagasan utama dalam sebuah pemikiran. Prinsip dalam tata kelola perbatasan merupakan bagian yang penting dimana prinsip juga dijadikan acuan dalam sebuah kebijakan pengembangan ekonomi keluatan Natuna. Berikut beberapa prinsip dalam tata kelola perbatasan menurut teori dari Wong Villanueva 2021 :

4.2.1.1 Prinsip Pengalaman bersama (*shared experience*)

Pengalaman bersama (*shared experience*) didefinisikan sebagai kepentingan bersama. Kabupaten Natuna diartikan sebagai wilayah yang kaya akan potensi sumberdaya alam perikanan tangkap yang mencapai 504.212,85 ton pada tahun 2017-2021. Besarnya jumlah tangkap di Natuna yang membuat keinginan perebutan wilayah kekuasaan di perbatasan diperebutkan pada kasus Indonesia dan China merupakan bukti yang nyata dimana Indonesia sangat mempertahankan Natuna sebagai wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Natuna merupakan daerah perbatasan dan gerbang kawasan ASEAN seperti Vietnam, kamboja, Malaysia, maupun Singapura memiliki peran strategis dan membangun daerah penghubung antar negara khususnya di bidang perekonomian dan perdagangan. Oleh sebab itu, perlu menjadi perhatian penting dalam menetapkan kebijakan yg strategis, valid serta relevan sehingga memberikan dampak yang jelas

dalam pembangunan nasional maupun daerah. Berikut merupakan definisi Natuna dari beberapa aktor yaitu :

Presiden Jowoki menyatakan bahwa Natuna merupakan prioritas utama dan juga sebagai kawasan perbatasan terdepan Indonesia. Presiden juga ingin mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sebagai daerah kepulauan, pembangunan di sektor kelauatan, perikanan dan pariwisata bahari di kabupaten Natuna diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. (Kemensetneg, 2017)

Pada wawancara yang di wawancarai oleh peneliti kepada Dinas perikanan, Dinas Pariwisata, BP3D dan BPP secara garis besar definisi Natuna menurut mereka, Natuna merupakan Pulau yang istimewa dimana banyak akan kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki baik potensi perikanan, pariwisata dan lain-lain maka dari itu Natuna harus diprioritaskan untuk Natuna yang lebih maju.

4.2.1.2 Prinsip Pembangunan Negara-bangsa (*Nation-state construction*)

Pembangunan Negara-bangsa (*Nation-state construction*) diartikan sebagai, yang mana pemerintah daerah menjalankan tugas yang diberikan pemerintah pusat untuk pengembangan daerah kekuasaannya. Kewenangan yang telah berupa bentuk membangun negara bangsa dalam artian membentuk lembaga-lembaga yang terkait dimana lembaga tersebut yang nantinya akan membantu pemerintah daerah. Dalam pemberian wewenang ini, pemerintah daerah telah melakukan penyusunan bentuk organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan perangkat daerah bentuk organisasi yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya. Lembaga-lembaga yang telah dibentuk yang nantinya membantu dalam menjalankan melaksanakan kegiatan dan mengkoordinasikan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya dalam pengembangan ekonomi keluatan di Natuna. Bentuk tugas dang fungsi aktor masing-masing dalam pengembangan ekonomi kelautan Natuna sudah dijelaskan pada bab 1 latar belakang, tugas yang sudah dijelaskan yaitu berupa tentang kebijakan pengembangan perbatasan dibidang ekonomi laut Natuna.

4.2.1.3 Prinsip Perbedaan skala (*scale difference*)

Perbedaan skala (*scale difference*) diartikan sebagai sejauh mana bentuk wilayah perbatasan Natuna digunakan dalam bentuk pengembangan pembangunan ekonomi kelautan. Bentuk kekuasaan perbatasan digunakan dalam pembangunan yang berkelanjutan seperti yang telah disampaikan oleh bapak Jokowi ingin ada pembangunan yang multidimensi yang bukan hanya kekuatan aparat penegak hukum, pertahanan dan keamanan di laut bahkan ratusan kapal-kapal nelayan dari Pantura sempat disiapkan untuk membantu menghidupkan Laut Natuna Utara. Hanya saja kapal nelayan terlalu kecil, sehingga sulit untuk berlayar hingga ke sana ucap Mahfud dalam wawancara (republikmerdeka, 2021).

Pada rapat terbatas tentang Natuna, di Kantor Presiden, Rabu 26 Juni 2016 Presiden Jokowi mengemukakan, ada tiga fokus yang ingin dikerjakan pemerintah di Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Ketiga fokus itu adalah : yang pertama yang berkaitan dengan industri perikanan, yang kedua yang berkaitan dengan industri migas Dan yang ketiga yang berkaitan dengan pertahanan (humas, 2016), Dari ketiga fokus tersebut tugas dan fungsi sudah dijalankan oleh aktor yang bersangkutan. Seperti pada fokus yang pertama bentuk bukti yang sudah dilakukan yaitu pembangunan SKPT.

Bentuk tugas yang sudah dijalan berupa pembangunan SKPT di Selat Lampa. SKPT ini direncanakan pada tahun 2015, dibangun tahun 2017 dan resmi di dijalankan pada tahun 2019. Pembangunan SKPT ini dibangun di Kabupaten Natuna tepatnya di Pelabuhan Selat Lampa Natuna. Tujuan dibangunnya SKPT ini untuk membantu perekonomian yang ada di Kabupaten Natuna dibidang ekonomi perikanan dan pemenuhan nilai-nilai ekspor perikanan. SKPT ini dibangun oleh pemerintah dibawah naungan BUMN Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia (Perindo) Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Gambar 4.1 Hasil Pembangunan SKPT Kabupaten Natuna

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Natuna 2020

SKPT merupakan bukti tugas yang telah dijalankan aktor dalam membangun pembangunan ekonomi kelautan yang ada di Natuna.

4.2.1.4 Prinsip Ungkapan kekuasaan (*notions of power*)

Ungkapan kekuasaan (*notions of power*) diartikan sebagai sejauh mana bentuk kekuasaan pemerintah daerah yang sudah dilakukan. Sejauh ini dalam masa jabatan pemerintah Natuna pada tahun 2017-2021 oleh Bapak Abdul Hamid Rizal dimana bentuk kekuasan yang telah dilakukan yaitu berupa :

Promosi wisata Natuna di Luar negeri, terkait promosi ini merupakan bentuk peran yang telah dilakukan oleh bapak Hamid untuk Natuna yang lebih maju. Ajang promosin ini dilakukan di Jepang pada 24 Juli 2018 dimana keberangkatan kerja guna

menjadi narasumber dalam mempromosikan pembangunan Natuna di mata dunia mewakili Indonesia (Wartakepri, 2018).

Gambar 4.2 Bupati Natuna promosi potensi di luar negeri

Sumber: Wartakepri 2018

Inti dari kedatangan yang dihadiri oleh Bupati Natuna adalah menyampaikan dan menjelaskan potensi investasi dan ekonomi Natuna, juga kesiapan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi masuknya investasi ke Natuna dengan mempermudah izin dan mempersingkat prosedur.

Pada tanggal 3 Juli 2018 Pemda Natuna kedatangan Rombongan Kementerian Luar Negeri terkait kedatangan tersebut membicarakan rencana pembangunan sektor wisata di wilayah Kabupaten Natuna. Salah satu sektor yang sedang giat dikembangkan oleh Pemerintah adalah bidang pariwisata. Berdasarkan hasil survey dari Tim Geologi, lokasi yang bisa dijadikan sektor wisata adalah gua Kamak Pengadah, Tanjung Datuk Teluk Buton, Selat Lampa, Teluk Depeh, Pulau Akar dan Alif Stone. Dinas Pariwisata

Kabupaten Natuna menyambut baik rancangan pembangunan sektor wisata yang akan didirikan oleh Kemenlu (wartakominfo, 2018).

4.2.2 Proses Pengelolaan perbatasan

Proses merupakan urutan dalam mencapai sebuah tujuan yang secara bersama-sama. Proses dalam teori tata kelola perbatasan ini merupakan bagian yang tidak kalah pentingnya dari prinsip dimana proses merupakan bentuk pelaksaan yang nyata dijadikan acuan untuk mencapai tujuan. Menurut Wong Villanueva tahun 2021 ada beberapa proses alam teori tata kelola yang perlu diperhatikan agar dalam proses tidak mengalami kegagalan berikut proses dari teori tata kelola perbatasan :

4.2.2.1 Proses Pengembangan pengetahuan (*knowledge creation*)

Pengembangan pengetahuan (*knowledge creation*) diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan pengetahuan dalam mewujudkan tujuannya. Dalam proses tata kelola perbatasan proses pengembangan pengetahuan ini menjadi acuan pertama untuk memahami arti dari pengembangan tersebut dimana pemerintah selaku peran utama dalam pengembangan. Pemerintah juga harus tau fungsi dan perannya sehingga tugas yang diberikan dapat dijalankan dengan baik. Berikut merupakan bentuk proses yang dijalan oleh pemerintah dengan lembaga yang terkait dalam pengembangan ekonomi keluatan di Natuna :

Dalam peningkatan ekonomi perbatasan pariwisata termasuk kedalam pengembangan ekonomi kelautan dimana pariwisata sangat berpotensi dalam miningkatkan ekonomi di Natuna. Wisata bahari di Natuna sangat berpotensi untuk

meningkatkan pengembangan dengan 46 objek wisata pantai dan pulau serta bisa melakukan *Water sport* (Olah Raga Air), *Snorkeling* (Menyelam), *Diving*, *Wreck diving* (menyelam ditujukan untuk mengeksplorasi bangkai kapal) , *windsurfing* (Selancar Angin), layang-layang, Marina, *Resort*. Selain bisa mengeksplor Laut di Natuna setiap tahunnya juga mengadakan *event* tetap/tahunan *Rally Yacht* dan kunjungan kapal pesiar dimana *event* (Disparbud 2021) yang dibuat ini menarik wisatawan asing ke Natuna. Berikut merupakan data wisatawan yang berkunjung di Natuna:

Tabel 4.3 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Natuna

No	Tahun	Jumlah Wisatawan Mancanegara			Jumlah Wisatawan Domestik		
		L	P	Total	L	P	Total
1.	2017	323	215	538	11169	2384	13553
2.	2018	152	102	254	13606	1293	14899
3.	2019	100	66	166	18300	2001	20301
4.	2020	16	11	27	12433	2231	14664
5.	2021	30	23	53	11195	9568	20763

Sumber: Disparbud 2021

Dilihat dari data kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2017 sampai tahun 2021 setiap tahunnya mengalami penurunan yang sangat drastis. Bentuk apresiasi dinas pariwisata menyelenggarakan *event* akbar demi mengangkat derajat parwisata Natuna, dari *event* yang diselenggarakan bermaksud untuk menarik banyak wisatawan domestik maupun mancanegara yang mulai menurun jumlah wisatawannya. Namun

upaya tersebut kurang diminati dikarenakan mahalnya biaya transportasi khususnya armada udara di Natuna (marwahkepri, 2017).

Berdasarkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat "meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan indutri kelautan yang berdaya saing" serta kebijakan pemerintah daerah dalam program "meningkatkan pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan pemasaran pariwisata". Berdasarkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait pengembangan pariwisata belum terealisasikan dengan baik dimana pemerintah daerah dan pemerintah pusat belum tersingkronisasikan dengan kebijakan yang dibuat sehingga yang seharusnya meningkatkan pengembangan pariwisata namun belum dilakukan dikarenakan upaya yang dilakukan belum disetujui oleh pemerintah pusat terkait pembangunan bandara untuk potensi pariwisata.

4.2.2.2 Proses Artikulasi hubungan (*articulation of relationship*)

Artikulasi hubungan (*articulation of relationship*) diartikan sebagai upaya yang dilakukan antar pemerintah dan lembaga terkait untuk membangun kerjasama yang baik. Dalam teori tata kelola perbatasan proses artikulasi hubungan adalah hal yang penting dimana kerja sama yang dibangun harus dilakukan melalui kerjasama yang baik. Berikut merupakan kerjasama antar pemerintah dalam pengembangan pembangunan ekonomi kelautan di Natuna:

Pada kebijakan yang ditetapakan pemerintah pusat terkait pengembangan ekonomi kelutan tentang "terbangunnya infrastruktur kelautan yang handal" dimana kebijakan ini berguna untuk pertumbuhan ekonomi di Natuna. Namun pada upaya untuk melaksanakan kebijakan tersebut pada peran pemerintah daerah, minta

pemerintah pusat untuk dibangun bandara bertaraf internasional di Natuna, tepatnya di Kelarik, Kecamatan Bunguran Utara, akan menjadi lokasi pembangunan bandara tersebut. Harapannya pembangunan akan dimulai pada tahun 2019 lalu namun hingga kini pembangunan tersebut belum juga disetujui oleh pemerintah pusat sedangkan pembangunan tersebut sangat membantu perekonomian di Natuna tepatnya pengembangan di bagian pariwisata (marwahkepri, 2017).

Selain pada upaya yang dilakukan pemerintah daerah terkait pada kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, minta pemerintah pusat menetapkan Kabupaten Natuna dan Kepulauan Anambas sebagai pintu keluar masuk kapal wisata asing. Namun Upaya tersebut belum disetujui oleh pemerintah pusat (republika, 2017). Dimana upaya ini jika terlaksanakan akan membangun fasilitas marina atau pelabuhan khusus dengan tambat dengan prasarana untuk kapal pesiar. Peluang dibangun marina tersebut guna untuk menangkap kapal-kapal pesiar.

4.2.2.3 Proses Pengambilan keputusan (*decision making*)

Proses Pengambilan keputusan (*decision making*) diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengambilan keputusan melalui kerjasama yang telah dibangun. Pada proses pengambilan keputusan ini merupakan hal penting yang mana seharusnya bisa dijalankan dengan baik dan semestinya. Berikut beberapa pengambilan keputusan yang dijalan oleh aktor yang terkait dalam pengembangan ekonomi keluatan di perbatasan Natuna :

Terkait kebijakan yang dibuat oleh bakamla masih kurang efisien dikarenakan patroli armada diperbatasan masing kurang, nelayan menyebutkan laut diperbatasan masih kurang aman. Kondisi ini membuat nelayan Natuna merasa tidak aman pada saat memancing ikan. Kondisi ini disebabkan kurang adanya penjagaan diarea perbatasan sehingga kapal asing berani mengambil ikan diarea perbatasan natuna (Kompas.tv. 2020).

Gambar 4.3 kapal asing diperbatasan Natuna

Sumber: Internet (diakses pada tanggal 21 Januari 2023)

Dilihat dari gambar diatas bahwa tidak adanya patroli yang dilakukan oleh pihak armada diperbatasan, sehingga dapat dilihat kapal asing yang berlayar bebas untuk menangkap ikan dilautan tersebut.

4.2.2.4 Proses Implementasi dan manajemen (*implementation and management*)

Implementasi dan manajemen (*implementation and management*) diartikan sebagai upaya antar aktor untuk memperkuat jalinan kerjasama. Berikut merupakan bentuk konsolidasi jalinan kerjasama antar aktor yang terkit :

Terkait pada kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, SKPT Selat Lampa di Natuna tidak berjalan dengan optimal ini dilihat dari nelayan lokal lebih memilih untuk menjual hasil tangkapan mereka kepada para pengepul atau penampung lain dari pada menjual ke SKPT dengan alasan harga beli ikan dari SKPT yang masih di bawah standar harga pasaran (Batamnews, 2021). Berikut dapat dilihat jumlah harga yang ditawarkan oleh Partai Persatuan Indonesia (Perindo) yang mana Perindo ini bekerja sama dalam mengembangkan potensi kelautan terutama produk perikanannya dengan melalui SPKT di Selat Lampa berikut harga yang ditawarkan oleh Perindo sebagai berikut:

Tabel 4.4 Data Penjualan Ikan Perum Perindo

Tahun/Bulan	2018	2019	2020
Januari	62,218.12	82,041.72	10,385.04
Febuari	43,596.56	9,425.74	26,864.70
Maret	670	34,406.60	17,447.42
April	86,626.56	64,542.70	7,155.10
Mei	115,204.05	31,131.00	676
Juni	75,244.77	13,196.47	13,221.00
Juli	54,528.75	21,196.30	9,391.00
Agustus	43,538.45	14,480.80	14,003.60
September	89,544.92	35,060.50	18,327.00
Oktober	64,438.16	8,040.20	13,358.00
November	78,069.63	17,168.60	16.1
Desember	70,074.22	14,233.37	5,495.00
Total	668,550.14	668,550.14	136,339.96

Sumber: Suriwahyudi 2021

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa jumlah penjualan ikan melalui perusahaan Perum Perindo mengalami penurunan setiap tahunnya, hal ini menunjukkan dalam proses pengembangan penjualan perikanan masih belum baik. Kurangnya standar harga oprasional yang ditetaptkan oleh Perindo menyebabkan nelayan beralih menjual hasil tangkapan mereka ke pengepul dengan harga yang lebih tinggi. Hal ini bisa mengakibatkan pengelolaan SKPT di Natuna kurang beroprasi.

4.2.2.5 Proses Penilaian hasil (*appraisal of results*)

Penilaian hasil (*appraisal of results*) diartikan sebagai hasil akhir dari tindakan yang telah dilakukan oleh aktor yang terkait, meliputi tiga subproses yaitu: perbedaan antara ekspektasi dengan hasil, pertimbangan konteks baru (risiko dan peluang), serta pengembangan umpan balik untuk meningkatkan kerja sama. Berikut beberapa poses hasil yang meliputi tiga subbab terkait :

a. Perbedaan hasil dan ekspetasi pada kebijakan pemerintah terkait SKPT yang seharunya hasil tangkapan nelayan dijual ke SKPT namun nelayan lebih memilih menjual dengan pengepul atau penampung lain dikarenakan harga yang ditawarkan oleh pengepul dan penampung lain lebih tinggi dibandingkan harga yang yang ditawarkan oleh SKPT Selat Lampa.
b. Perbedaan hasil dan ekspetasi pada kebijakan pemerintah terkait pembangunan infrastruksur di Natuna belum dimaksimalkan dikarenakan anggaran yang seharusnya disediakan oleh APBN membangun pembangunan harus tersalurkan

untuk kasus kapal nelayan asal China yang dikawal kapal *coast guard* memasuki perairan Natuna.

Dapat dilihat dari prinsip dan proses yang dijabarkan dengan menggunakan teori tata kelola perbatasan maka secara prinsip dari pengembangan yang sedang dilakukan dengan optimal namun secara proses belum terlaksanakan dengan baik. Untuk melihat hasil capaian kinerja dalam pengembangan ekonomi perbatasan di Kabupaten Natuna tahun 2017-2021 sebgai berikut:

Tabel 4.4 Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Misi	Sasaran	Indikator kinerja	Capaian
1.	Mewujudkan perekonomian berbasis sumberdaya alam potensial daerah	Meningkatnya aktifitas ekonomi daerah	Laju pertumbuhan ekonomi dengan migas	65%
			Laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas	
		Meningkatnya konstribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Konstribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB (dengan migas)	95%
		Meningkatnya konstribusi sektor industri pengolahan	Konstribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	55%
			Konstribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	95%
		Meningkatnya nilai investasi di sektor potensial daerah	Jumlah nilai investasi berkala	100%

			nasional (PMPDN & PMA)	
2.	Meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat pesisir, nelayan dan petani	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Tingkat kemiskinan	100%
			Pendapatan perkapital	
		Meningkatnya kesejateraan petani	Nilai tukar petani	100%
3.	Membuka keterisoliran daerah/desa melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi laut dan pembukaan jalan	Meningkatnya konektivitas kecamatan / desa	Jumlah kecamatan/desa Sudah terakses (Pelabuhan)	100%
			Jumlah kecamatan sudah terakses angkutan darat	
			Jumlah kecamatan sudah terakses jalan	
		Meningkatnya konektivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah kawasan strategis ekonomi yang terakses (Armada Laut)	85%
			Jumlah kawasan strategis ekonomi yang terakses angkutan darat	
			Persentase kawasan strategis ekonomi yang sudah terakses jalan	
			Jumlah frekwensi penerbangan (per minggu)	

Sumber: Lakip Kabupaten Natuna 2021

Upaya untuk mencapai kinerja Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Natuna menetapkan 9 sasaran strategis dalam pengembangan potensi ekonomi kelautan, dari 9

sasaran strategis tersebut hanya 2 sasaran strategis yang belum tercapai secara maksimal, yaitu Meningkatnya Aktifitas Ekonomi Daerah dan Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan. Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja Sasaran Strategis pada Tahun 2017-2021 dapat diperoleh melalui gambaran tentang rata-rata capaian kinerja sasaran strategis sebesar 90% persen (Sangat Baik) dengan rincian sebagai berikut:

- 4 Sasaran memperoleh capaian kinerja > 100% (Sangat Baik)
- 3 Sasaran memperoleh capaian kinerja > 71% - 100% (Baik)
- 2 Sasaran memperoleh capaian kinerja > 50% - 70 % (Cukup Baik)

Peran dan bentuk tata kelola yang dilakukan pemerintah daerah untuk memajukan daerah perbatasan. Dalam bentuk untuk mencapai sebuah tujuan bersama yaitu pengembangan ekonomi perbatasan dibidang kelautan yang lebih maju, maka antara pemerintah dan pelaksana kegiatan harus memiliki tujuan yang searah dengan menggunakan prinsip tata kelola perbatasan. Dalam penerapan teori tata kelola perbatasan tersebut, pemerintah harus menggunkam prinsip dan menjalankan proses sebagi acuan dan dijalankan secara bersamaan agar program yang sudah dirancang pemerintah dapat berjalan secara optimal.

BAB 5
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Prinsip 1 menyimpulkan secara garis besar Natuna merupakan bagian wilayah Indonesia yang sangat diprioritaskan, hal ini menjadikan Natuna bagian yang harus dikembangkan secara baik agar ekonomi keluatan dimanfaatkan secara optimal.

Prinsip 2 menyimpulkan dalam pembagian peran sudah dijalankan dengan baik dengan tugas dan peran masing-masing aktor sudah diterapkan oleh aktor dengan baik dan tepat.

Prinsip 3 menyimpulkan kegunaan kontrol yang diberikan sudah sangat baik ini dapat dikatakan banyak kunjungan kerja yang dilakukan secara langsung untuk mengatasi dalam pembangunan Natuna.

Prinsip 4 menyimpulkan bentuk kekuasaan yang dilakukan sudah sangat baik ini dapat dikatakan dalam kunjungan bupati dalam mempromosikan Natuna sudah dilakukan dengan sebagaimana semestinya.

Kesimpulan dari prinsip: bahwa secara prinsip-prinsip pengelolaan perbatasan menurut teori Jose L. Wong Villanueva, pengembangan ekonomi kelautan di Kabupaten Natuna sudah terbukti sangat penting bagi pemerintah Indonesia.

Proses 1 menyimpulkan dalam mewujud tujuan yang ingin dicapai bentuk upaya sudah dilakukan sudah baik hanya saja belum terealisasikan dengan baik tepat sehingga upaya yang dilakukan kurang membuahkan hasil yang optimal.

Proses 2 menyimpulkan dalam bentuk kerjasama yang dilakukan dalam mencipatakan pembangunan dengan baik masih belum dilakukan secara optimal dikarenakan adanya kebutuhan yang lebih penting dan darurat.

Proses 3 menyimpulkan dalam kerjasama hubungan yang dibangun antar aktor yang terkait belum dilakukan secara baik dimana aktor masih melakukan perannya secara terpisah dan pengambilan keputusan kurang tepat sesuai dengan kebutuhan.

Proses 4 menyimpulkan dalam menjalin kerjasama yang dilakukan masih terbilang minim dikarenakan tujuan yang diharapkan aktor dalam kerjasama tersebut kurang optimal.

Proses 5 menyimpulkan perbedaan hasil akhir yang diberikan sesuai dengan indikator dan subab pada proses yaitu perbedaan antara ekspektasi dengan hasil, pertimbangan konteks baru (risiko dan peluang), serta pengembangan umpan balik untuk meningkatkan kerja sama.

Kesimpulan proses: bahwa secara proses-proses pengelolaan perbatasan menurut teori Jose L. Wong Villanueva, proses pengelolaan pengembangan ekonomi kelautan di Kabupaten Natuna masih belum berjalan dengan baik

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Kabupaten Natuna mengenai Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Ekonomi Laut Diperbatasan kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini : Peran pemerintah

Kabupaten Natuna dalam membuat kebijakan pengembangan ekonomi laut diperbatasan sudah baik secara prinsip hanya saja secara proses belum optimal.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan di atas, penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Kajian ini masih jauh dari selesai. Namun berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menawarkan saran sementara untuk dijadikan masukan dan evaluasi lebih lanjut yaitu : Perlu adanya peningkatan tata kelola perbatasan yang lebih baik untuk pengembangan potensi perbatasan ekonomi kelautan di Kabupaten Natuna dalam memajukan ekonomi perbatasan yang labih baik dengan menjadikan teori tata kelola perbatasan sebagai pedoman agar memperoleh hasil yang maksimal.